

## *The Implementation of Covid-19 Archives Preservation in College*

### Implementasi Penyelamatan Arsip Covid-19 di Perguruan Tinggi Negeri

Lolytasari<sup>1</sup>, Hikmah Irfaniah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

<sup>2</sup>Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

**Paper Type:**

Penelitian/Research Paper

Submitted: 12 March 2022

Revised: 30 April 2022

Accepted: 15 July 2022

Online: 13 December 2022

\* Correspondence:  
Lolytasari

E-mail:  
lolytasari@uinjkt.ac.id

#### **Abstract**

**Background of the study:** Circular Letter No. 62 of 2020 concerning the Preservation of Covid-19 handling archives is a public policy that needs to be implemented by State Universities as part of government agencies.

**Purpose:** This study aims to explore efforts to implement policies to preserve the records of Covid-19 handling at university and understand the challenges it faces as university that doesn't have its own Archive yet.

**Method:** This study uses a qualitative approach with a case study method. There are three informants selected through the purposive sampling method. Informants were selected based on the following criteria: 1) has mandatory duties in archival activities and 2) positioned as an archivist. Research data obtained through interviews and documentation studies

**Findings:** The university efforts in preserving Covid-19 handling archives are carrying out internal communication to preserve archives within the General, increasing archivists' competencies and knowledge, and conducting from preparation to Covid-19 archives assessment. Related efforts in the organizational structure have not been made because this process takes a long time. The challenges arise from the lack of human resources in every unit of PTN X and the absence of an archival institution which makes it difficult to implement implementation in all units of university

**Conclusion:** The university has made efforts to preserve the handling of Covid-19 within the smaller scope, the General Bureau. For a wider scope, the implementation has not been carried out due to lack of human resources and the absence of university Archive owned by university.

**Keywords:** archives preservation, Covid-19 archives, public policy, university archives

## Abstrak

**Latar Belakang Masalah:** Surat Edaran Nomor 62 tahun 2020 tentang penyelamatan arsip penanganan COVID-19 merupakan kebijakan yang perlu diimplementasi oleh Perguruan Tinggi Negeri sebagai bagian dari instansi pemerintah.

**Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi upaya implementasi kebijakan penyelamatan arsip COVID-19 di Perguruan Tinggi Negeri dan memahami tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Perguruan Tinggi Negeri yang belum memiliki Lembaga Kearsipan.

**Metode Penelitian:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Terdapat dua informan yang dipilih melalui metode purposive sampling. Informan dipilih berdasarkan kriteria berikut: 1) memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang kearsipan tingkat universitas dan 2) memiliki jabatan fungsional sebagai arsiparis. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi.

**Temuan:** Upaya Perguruan Tinggi Negeri dalam mengimplementasikan kebijakan penyelamatan arsip penanganan Covid-19 adalah melakukan komunikasi internal dalam Biro Umum untuk melakukan penyelamatan arsip dalam lingkup Biro, meningkatkan kompetensi dan pengetahuan di bidang kearsipan, dan melakukan kegiatan persiapan sampai penialaian arsip penanganan Covid-19 di lingkup Biro Umum. Terkait upaya dalam struktur organisasi belum dilakukan karena proses ini membutuhkan waktu yang panjang. Tantangan muncul dari SDM yang belum tersebar di setiap unit Perguruan Tinggi Negeri dan belum adanya lembaga kearsipan yang memberi dampak sulitnya implementasi diterapkan diseluruh unit Perguruan Tinggi Negeri.

**Kesimpulan:** Perguruan Tinggi Negeri telah melakukan upaya penyelamatan arsip penanganan Covid-19 walaupun masih dalam lingkup Biro Umum. Untuk cakupan yang lebih luas, implementasi penyelamatan arsip penanganan Covid-19 belum bisa dilaksanakan karena faktor sumber daya dan belum adanya Lembaga Kearsipan di Perguruan Tinggi Negeri.

**Kata Kunci:** Penyelamatan arsip, arsip Covid-19, kebijakan publik, arsip universitas.

---

---

To cite this document:

Lolytasari, Irfaniah, H. (2022). The Implementation of Covid-19 Archives Preservation in Collage. *Record and Library Journal*, 8(2). 239-247. DOI: 10.20473/rlj.V8-I2.2022.239-247.

Open access under Creative Commons Attribution-Share A like 4.0 International License

(CC-BY-SA)



## Pendahuluan

Sejak diumumkannya kasus Covid-19 pertama di Indonesia tanggal 2 Maret 2020 ([Ratna, 2020](#)) Pemerintah pusat telah menerbitkan kebijakan-kebijakan terkait penanganan Covid-19 di Indonesia, diantaranya Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) tanggal 13 Maret 2020, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 tanggal 31 Maret 2020, dan Perpanjangan Masa Berlaku *Addendum* Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah, dan Upaya Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), selama bulan suci Ramadhan 1442 Hijriah tanggal 24 Mei 2021. Sejak 13 Maret 2020 sampai dengan 24 Mei 2021 terdapat 119 regulasi yang dapat diakses masyarakat terkait penanganan Covid-19 di Indonesia yang terhimpun dalam [covid-19.go.id](https://www.covid-19.go.id), yaitu situs resmi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Regulasi di atas merupakan bukti adanya kegiatan penanganan Covid-19 sehingga regulasi-regulasi tersebut perlu diarsipkan dengan baik. Mengingat pentingnya arsip mengenai penanganan Covid-19, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 62 tahun 2020 tentang penyelamatan arsip penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Dalam Edaran tersebut arsip penanganan Covid-19 dianggap sebagai warisan dokumenter penting untuk memberikan perspektif historis mengenai bagaimana pemerintah maupun masyarakat menangani Pandemi Covid-19. Kategori arsip yang perlu diselamatkan yaitu arsip-arsip terkait percepatan penanganan Covid-19, terdapat tujuh kriteria arsip, yaitu arsip yang tercipta dalam rangka: 1) penetapan dan pelaksanaan kebijakan; 2) pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan; 3) pengawasan pelaksanaan; 4) penerahan sumber daya; 5) pelaporan; 6) akibat atau dampak penanganan secara langsung maupun tidak langsung; dan 7) upaya penanggulangan Covid-19 yang tidak terbatas pada inovasi, sarana dan prasarana/infrastruktur, pengobatan vaksin, perawatan pasien, penggunaan teknologi, dan hasil riset. Dari kriteria-kriteria tersebut, terlihat bahwa arsip penanganan Covid-19 merupakan bukti penting akuntabilitas kinerja lembaga-lembaga dalam menangani Covid-19 di wilayah kerja mereka. Diperkuat pendapat [Banda \(2020\)](#) bahwa krisis kesehatan yang melanda dunia, bukan hanya pandemik saat ini saja dapat dijadikan sebagai dokumentasi salah satu kunci pengetahuan masyarakat.

Terlepas bahwa arsip merupakan bukti akuntabilitas kinerja, arsip penanganan Covid-19 perlu dikelola dengan baik karena memiliki nilai informasi, yaitu atribut yang berkaitan dengan isi arsip dalam hal keunikannya; sejauh mana informasi terkonsentrasi (berkaitan dengan 'kualitasnya'); dan pentingnya informasi yang terkandung ([Williams, 2006](#)). Arsip-arsip penanganan Covid-19 dapat memberikan informasi di masa mendatang dan dapat menjadi sumber kajian dan pembelajaran dalam menghadapi pandemi. Beberapa negara menunjukkan perbaikan penanganan pandemi dari hasil kajian penanganan pandemi sebelumnya, seperti yang terjadi di negara-negara Amerika Utara dan Eropa, peningkatan kesiap-siagaan secara signifikan dalam menghadapi pandemi H1N1 pada tahun 2009 merupakan hasil perbaikan dari penanganan wabah SARS tahun 2002-2003 ([Sauders-Hastings & Krewski, 2016](#)).

Penyelamatan arsip pandemi Covid-19 sebagai memori kolektif bangsa menjadi penting diketahui agar masyarakat memahami bagaimana respon pemimpin saat ini dan menjadi rujukan bagi para pembuat keputusan di masa mendatang ([Azmi, 2020](#)). Hasil studi mengenai wabah di antaranya adalah studi mengenai malaria yang juga membahas penanganan malaria di Indonesia para era kolonial 1808-1937 ([Arsin, 2012](#)) dan Pengendalian Wabah Flu Burung di

To cite this document:

Lolytasari, Irfaniah, H. (2022). The Implementation of Covid-19 Archives Preservation in Collage. *Record and Library Journal*, 8(2). 239-247. DOI: 10.20473/rj.v8-i2.2022.239-247.

Open access under Creative Commons Attribution-Share A like 4.0 International License

Provinsi Jawa Timur Periode 2004-2012 ([Setiansyah, 2018](#)), dalam kajiannya menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dan diperkuat dengan kebijakan pemerintah daerah mengenai flu burung berhasil mengurangi kasus penularan secara signifikan pada tahun 2012. Kajian-kajian di atas membuktikan pernyataan Campbell bahwa arsip membentuk memori dari suatu organisasi, dan organisasi sering merujuk ke arsip lama ketika merumuskan kebijakan atau meninjau kegiatan saat ini ([Cox, 2001](#)) dan agar generasi mendatang dapat memanfaatkan arsip tersebut untuk sumber penelitian sejarah, pengembangan pengetahuan, dan inovasi berkelanjutan ([Azmi, 2020](#)). Oleh karena itu arsip yang tercipta dalam rangka penanganan Covid-19 harus dikelola sebagai arsip penting sebuah organisasi atau institusi.

Sebagai institusi pemerintah, Perguruan Tinggi Negeri harus ikut menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 62 tahun 2020 tentang penyelamatan arsip penanganan Covid-19 dengan mulai melakukan upaya pengelolaan arsip dalam rangka penyelamatan arsip tersebut. Beberapa Perguruan Tinggi Negeri telah merespon surat edaran tersebut dengan menghimpun arsip-arsip yang termasuk dalam kriteria arsip penanganan percepatan Covid-19. Diantara Perguruan Tinggi Negeri yang telah melakukannya yaitu Universitas Brawijaya dan Universitas Gadjah Mada (UGM). Ditinjau dari kelembagaan, kedua lembaga tersebut telah memiliki Lembaga Kearsipan sehingga kegiatan penyelamatan arsip Covid-19 dapat terkoordinir. Akan tetapi, implementasi Surat Edaran Nomor 62 tahun 2020 di PTN tanpa lembaga kearsipan belum dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini menyoroti bagaimana implementasi penyelamatan arsip Covid-19 di PTN yang belum memiliki lembaga kearsipan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi kegiatan kearsipan terkait penyelamatan arsip Covid-19 dan memahami tantangan-tantangan yang dihadapi oleh PTN yang belum memiliki Lembaga Kearsipan dalam menerapkan apa yang tertulis dalam Surat Edaran Nomor 62 tahun 2020. Penelitian ini perlu dilakukan agar hambatan dalam realisasi penyelamatan arsip Covid-19, khususnya bagi Perguruan Tinggi yang belum memiliki lembaga kearsipan, dapat diminimalisir berdasarkan temuan yang didapat dari penelitian ini.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan untuk mengeksplorasi; untuk menyelidiki dan mempelajari fenomena sosial dengan kuat; untuk membongkar makna yang dianggap berasal dari aktivitas, situasi, peristiwa, atau artefak; atau untuk membangun pemahaman yang mendalam tentang beberapa dimensi kehidupan sosial ([Leavy, 2017](#)) Pendekatan kualitatif digunakan karena tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi kegiatan kearsipan terkait penyelamatan arsip Covid-19 dan memahami tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan Surat Edaran Nomor 62 tahun 2020. Penelitian ini merupakan studi kasus yang mengeksplorasi kegiatan di PTN X. Informan dalam penelitian ini berjumlah dua orang, yang dipilih melalui metode purposive sampling. Informan dipilih berdasarkan kriteria berikut: 1) memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang kearsipan tingkat universitas dan 2) memiliki jabatan fungsional sebagai arsiparis. Data penelitian diperoleh melalui wawancara para informan dan studi dokumentasi.


### Hasil dan Diskusi

Sejak Covid-19 dijadikan sebagai wabah nasional, berbagai kebijakan diterbitkan oleh pemerintah yang kemudian ditanggapi oleh Perguruan Tinggi dengan mengeluarkan beragam kebijakan dan melakukan upaya-upaya penanganan Covid-19 yang disesuaikan dengan kegiatan kampus. Kebijakan publik bisa dipahami sebagai upaya pemerintah dalam bentuk aturan dan keputusan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya dan mengikat bagi

To cite this document:

Lolytasari, Irfaniah, H. (2022). The Implementation of Covid-19 Archives Preservation in Collage. *Record and Library Journal*, 8(2). 239-247. DOI: 10.20473/rj.v8-i2.2022.239-247.

Open access under Creative Commons Attribution-Share A like 4.0 International License

(CC-BY-SA) 

orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Menurut I Gde Pantja Astawa, surat edaran termasuk ke dalam kelompok peraturan kebijakan (*Beleidsregels*) (Soebroto, 2012). Edwards III memperkenalkan empat faktor yang perlu dilihat dalam implementasi kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana, dan struktur organisasi termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor tersebut bisa dilihat sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses implementasi (Akib, 2010). Surat Edaran Nomor 62 tahun 2020 tentang penyelamatan arsip penanganan Covid-19 merupakan kebijakan yang bisa dianalisa implementasinya berdasarkan empat faktor di atas.

### *Komunikasi*

Sejak masa pandemik bulan Maret 2020 sampai saat ini (Juni 2021), tim kearsipan PTN X belum menilai, mengumpulkan, menghimpun arsip yang tercipta yang berkaitan dengan arsip Covid-19 dari unit-unit yang terdapat di PTN X. Akan tetapi, akuisisi arsip terkait penanganan Covid-19 sudah menjadi rencana. Hal ini didasari dari pernyataan informan:

*“sudah terpikir akan melakukan pengumpulan arsip-arsip terkait Covid-19, yang tersebar di berbagai unit yang ada. Agar memudahkan para peneliti, jika membutuhkan arsip tersebut.”* (SD, 24 Juni 2021).

Pernyataan ini dapat dipahami bahwa informan akan melakukan progress pengelolaan arsip Covid-19 dan menyebutkan pula adanya regulasi dari pemerintah yang berkaitan dengan wajibnya mengelola arsip. Informan menyadari bahwa arsip Covid-19 perlu diselamatkan, dengan pernyataannya:

*“sisi lain memastikan penyelamatan terhadap arsip Covid-19 sebagai bukti pertanggungjawaban nasional, lembaga belum mengeluarkan kebijakan tertulis secara khusus untuk mengumpulkan dan menyelamatkan arsip tersebut”* (SD, 24 Juni 2021).

Salah satu penyebabnya informan menyebutkan adalah belum adanya lembaga kearsipan, sehingga tidak ada kewajiban bagi pencipta arsip di unit menyerahkan arsipnya ke Bagian Umum.


*“walau belum ada LKPT tapi kami tetap melakukan kegiatan kearsipan yang dimulai penciptaan arsip, penyimpanan arsip. Arsip yang dikelola bukan hanya arsip berkenaan covid-19 saja, tetapi arsip pada umumnya kami kelola juga”* (SD, 24 Juni 2021).

Wahab menyatakan bahwa komunikasi berperan penting bagi berlangsungnya koordinasi dan implementasi pada umumnya. Komunikasi memang memainkan peran penting bagi berlangsungnya koordinasi dan implementasi pada umumnya. Namun, komunikasi yang sempurna sulit untuk bisa diwujudkan (Sidauruk, 2013). Hal ini juga dirasakan PTN X. Tidak adanya kebijakan PTN X mengenai kewajiban menyerahkan arsip dan kebijakan terkait penyelamatan arsip Covid-19 menyebabkan tidak adanya komunikasi dan koordinasi terkait dengan penyelamatan arsip Covid-19. Adapun penyelamatan arsip penanganan Covid-19 hanya dikomunikasikan di lingkup Biro Umum sehingga upaya yang dilakukan adalah penghimpunan dan penyimpanan arsip yang terbatas dalam lingkup Biro Umum saja.

To cite this document:

Lolytasari, Irfaniah, H. (2022). The Implementation of Covid-19 Archives Preservation in Collage. *Record and Library Journal*, 8(2). 239-247. DOI: 10.20473/rj.v8-i2.2022.239-247.

Open access under Creative Commons Attribution-Share A like 4.0 International License

(CC-BY-SA) 

### Sumberdaya

Arsiparis merupakan sumber daya manusia penting karena garda depan dalam menghimpun dan menyelamatkan arsip yang tercipta pada suatu lembaga. Sumber daya manusia adalah upaya, pengetahuan, kapabilitas, dan perilaku berkomitmen yang disumbangkan orang pada organisasi kerja untuk menyelesaikan tugas dan memungkinkan organisasi melanjutkan keberadaannya di masa depan (Watson, 2006). PTN X mulai menyadari pentingnya tata kelola arsip yang tercipta di tiap unit. Upaya pengangkatan arsiparis membuktikan keseriusan perguruan tinggi dalam tata kelola arsip dan menyelamatkan arsip. Terdapat 13 orang arsiparis yang tersebar di biro-biro dan fakultas-fakultas dengan 1 koordinator untuk mengkomunikasikan dan mengatur pelaksanaan tugas kearsipan. Sebagaimana yang diutarakan oleh informan:

*“Penyebaran 13 arsiparis di tiap Fakultas, untuk memudahkan koordinasi dalam pelaksanaan tugas kearsipan, selain itu akan merancang Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi.” (SD, 24 Juni 2021).*

Tabel 1. Penyebaran Arsiparis di setiap unit PTN X

No	Penyebaran Arsiparis	Jumlah Arsiparis
1	Bagian Umum Biro AUK	4
2	Bagian OKP	4
3	LP2M	1
4	FEB	2
5	FSH	2
6	Fakultas Ushuluddin	1
7	Fakultas Psikologi	1

Sumber: Hasil Wawancara dengan SD

Penambahan arsiparis sebagai penguatan sumber daya manusia di kegiatan kearsipan PTN X belum berdampak pada kegiatan penyelamatan arsip Covid-19 di seluruh PTN X karena sebaran arsiparis belum merata ke setiap Biro, Fakultas, dan unit lain. Walaupun demikian, dengan adanya penambahan arsiparis, inisiasi terkait penyelamatan arsip penanganan Covid-19 sudah mulai dilakukan di Biro Umum sendiri. Arsiparis Biro Umum juga melakukan penguatan kompetensi SDM di bidang kearsipan dengan mengikuti workshop dan webinar kearsipan.


### Sikap birokrasi/pelaksana

Sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana terhadap program (Akib, 2010). Berbagai kebijakan pimpinan perguruan tinggi X dalam menanggulangi Covid-19 telah dilakukan. Maka dapat dikatakan semakin mewabahnya Covid-19, maka semakin kebijakan-kebijakan pimpinan akan terbit. Implementasi dari kebijakan yang diterbitkan pimpinan adalah berupa tindakan-tindakan apa yang akan dilakukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin pengelola arsip wajib menyelamatkan arsip-arsip Covid-19 tersebut sebagai bahan akuntabilitas kinerja arsiparis dalam pengelolaan arsip dan arsip tersebut menjadi memori kolektif bagi perguruan tinggi dalam mengatasi suatu kejadian khusus yang perlu kebijakan khusus. Jika merujuk pada kebijakan kearsipan pemerintah sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Nomor 62 tahun 2020, maka perguruan tinggi dalam menyelamatkan arsip Covid-19nya wajib melakukan 5 tahap, tergambar pada Gambar 1. Kemudian dalam pengelolaannya dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, arsip memiliki kekuatan dalam penetapan kebijakan percepatan pencegahan Covid-19 sehingga memiliki nilai sejarah

To cite this document:

Lolytasari, Irfaniah, H. (2022). The Implementation of Covid-19 Archives Preservation in Collage. *Record and Library Journal*, 8(2). 239-247. DOI: 10.20473/rj.v8-i2.2022.239-247.

Open access under Creative Commons Attribution-Share A like 4.0 International License

(CC-BY-SA) 

dan terakhir membuat laporan daftar arsip yang akan di kirimkan ke ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) setelah dua tahun masa Covid-19 berakhir. Pemberakhiran masa Covid-19 ditetapkan oleh pemerintah ([Indonesia., 2020](#)).



Gambar 1. Tahapan penyelamatan arsip penanganan Covid-19 berdasarkan Surat Edaran Nomor 62 tahun 2020

Berdasarkan gambar di atas, kegiatan penyerahan arsip penanganan Covid-19 ke lembaga kearsipan merupakan tujuan yang akan dicapai dan merupakan perwujudan dari penyelamatan arsip penanganan Covid-19 sebagai warisan dokumenter di masa mendatang. Tahapan tersebut dilakukan arsiparis Biro Umum sebagai pelaksana kegiatan kearsipan. Kegiatan mulai dari persiapan sampai dengan penilaian arsip dilakukan dalam lingkup Biro Umum sebagai sikap yang diambil para arsiparis melihat pentingnya program ini walaupun PTN X sendiri tidak memiliki kebijakan tentang kegiatan penyelamatan arsip penanganan Covid-19.

### Struktur organisasi

Secara struktur dalam mengelola arsip, Perguruan Tinggi X belum memiliki Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi. Informan mengemukakan bahwa pendirian Lembaga Kearsipan bukan hal yang tidak mudah sebab harus merevisi ortaker (organisasi tata kerja) yang ada. Sehingga akan memakan waktu. Tidak adanya struktur organisasi Lembaga Kearsipan tentunya menjadi faktor penghambat kegiatan kearsipan di lingkup PTN X karena pengelolaan arsip statis menjadi tidak dapat dilakukan secara maksimal karena masih tersebar di setiap unit dan pengawan sulit dilakukan. Dampak lain adalah lambannya menanggapi perkembangan kegiatan kearsipan di Indonesia. Belum dilakukannya pendataan dan identifikasi, penataan dan pendaftaran, dan penilaian arsip penanganan Covid-19 di setiap unit disebabkan tidak terfasilitasinya program ini dalam bentuk struktur organisasi dan tupoksi. Jackson dan Morgan menyatakan bahwa Struktur adalah serangkaian kewajiban yang perlu dilakukan dalam mencapai tujuan organisasi yang tergambarkan dalam tabel organisasi ([Setiawan & Puspitasari, 2018](#)). Penyelamatan arsip penanganan Covid-19 dapat tercapai jika PTN X memiliki struktur organisasi dimana serangkaian kewajiban terkait penyelamatan arsip dengan tegas tertulis.

### Simpulan

Dalam mengimplementasikan kebijakan kearsipan yang diterbitkan pemerintah, PTN X dalam lingkup Biro Umum telah melakukan identifikasi, penataan dan pendaftaran, dan

To cite this document:

Lolytasari, Irfaniah, H. (2022). The Implementation of Covid-19 Archives Preservation in Collage. *Record and Library Journal*, 8(2). 239-247. DOI: 10.20473/rj.v8-I2.2022.239-247.

Open access under Creative Commons Attribution-Share A like 4.0 International License

penilaian arsip penanganan Covid-19 baik dalam bentuk fisik maupun digital. Faktor komunikasi internal dan sikap pelaksanaan menjadi faktor pendorong kegiatan ini dapat terlaksana. Untuk cakupan yang lebih luas, implementasi penyelamatan arsip penanganan Covid-19 belum bisa dilaksanakan karena sumber daya yang belum tersebar di setiap unit dan struktur organisasi yang belum ada. Sehingga upaya implementasi bisa dilakukan terbatas pada lingkup Biro Umum saja.

Semakin banyak terciptanya arsip Covid-19, maka semakin diperlukan kebijakan dalam pengelolaan pengarsipan Covid-19 sebagai memori kolektif nasional. Temuan ini tidak hanya berlaku bagi PTN X tetapi dapat diterapkan pada perguruan tinggi negeri lainnya. Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi sangat diperlukan untuk merancang program penyelamatan arsip Covid-19 yang dapat memaksa pemindahan arsip dari setiap unit yang ada di lingkungan ke dalam unitnya. Adanya Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi akan memudahkan arsiparis dalam mengimplementasikan kebijakan kearsipan. Penelitian ini merupakan gambaran implementasi kebijakan yang terbatas pada lingkup Biro Umum, oleh karena itu upaya penerapan kebijakan penyelamatan arsip Covid-19 unit kerja yang lain perlu dieksplorasi untuk mendapat gambaran yang lebih besar mengenai kegiatan kearsipan di Universitas X khususnya dalam menerapkan kebijakan penyelamatan arsip Covid-19.


## Referensi

- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–11.
- Arsin, A. A. (2012). *Malaria di Indonesia: Tinjauan Aspek Epidemiologi*. Masagena Press.
- Azmi. (2020). Strategi Penyelamatan Arsip Statis Pandemi Covid-19 sebagai Memori Kolektif Bangsa oleh Lembaga Kearsipan. *Jurnal Kearsipan*, 15(1), 1–24.
- Banda, F. (2020). Documentary heritage is a *unique knowledge asset for Covid-19 decision-making* By Fackson Banda, Chief, Documentary Heritage Unit (Memory of the World) *Pandemics have occurred at various points in time: the Plague of Athens in 430 BC; the 14.*
- Cox, R. J. (2001). *Managing Records As Evidence and Information*. Quorum Books.
- Indonesia. (2020). Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 tahun 2020 tentang Penyelamatan Arsip Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam Mendukung Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Leavy, P. (2017). *Research Design*. The Guilford Press.
- Ratna, N. (2020). Kasus Covid-19 Pertama, Masyarakat Jangan Panik. Indonesia.Go.Id. <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/kasus-covid-19-pertama-masyarakat-jangan-panik>
- Sauders-Hastings, P. R., & Krewski, D. (2016). Reviewing the History of Pandemic Influenza: Understanding Patterns of Emergence and Transmission. *Pathogen*, 5(66), 1–19. <https://doi.org/doi:10.3390/pathogens5040066>
- Setiansyah, N. C. (2018). Pengendalian Wabah Flu Burung Di Provinsi Jawa Timur Periode 2004- 2012. *Jurnal Sejarah Indonesia*, 1(1), 157–174.
- Setiawan, S. A., & Puspitasari, N. (2018). Preferensi Struktur Organisasi bagi Generasi Millennial. *Jurnal Borneo Administrator*, 14(2), 101–118. <https://doi.org/DOI:10.24258/jba.v14i2.336>
- Sidauruk, P. L. (2013). Peranan Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pusat Layanan Internet Kecamatan (Kasus di provinsi Kepulauan Bangka Belitung). *Jurnal Penelitian*

To cite this document:

Lolytasari, Irfaniah, H. (2022). The Implementation of Covid-19 Archives Preservation in Collage. *Record and Library Journal*, 8(2). 239-247. DOI: 10.20473/rj.v8-i2.2022.239-247.

Open access under Creative Commons Attribution-Share A like 4.0 International License

(CC-BY-SA) 



*Pos Dan Informatika*, 3(1), 81–113. <https://jurnal-ppi.kominfo.go.id/index.php/jppi/article/viewFile/37/29>

Soebroto, A. C. (2012). *Kedudukan hukum peraturan/kebijakan dibawah peraturan menteri perencanaan pembangunan nasional/kepala bappenas*. BAPPENAS. [https://jdih.bappenas.go.id/data/file/WORKSHOP\\_Peraturan\\_kebijakan\\_di\\_Kementerian\\_PPN\\_bappenas.pdf](https://jdih.bappenas.go.id/data/file/WORKSHOP_Peraturan_kebijakan_di_Kementerian_PPN_bappenas.pdf).

Watson, J. T. (2006). *Organising and Managing Work*. Pearson.

Williams, C. (2006). *Managing Archives Foundations, Principles and Practice*. Chandos Publishing.

To cite this document:

Lolytasari, Irfaniah, H. (2022). The Implementation of Covid-19 Archives Preservation in Collage. *Record and Library Journal*, 8(2). 239-247. DOI: 10.20473/rj.v8-i2.2022.239-247.

Open access under Creative Commons Attribution-Share A like 4.0 International License